



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Kineja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	WTP	WDP	66,67	213.296.868.251	210.407.060.884	98,68
2	Tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	93,20%	89,84	96,39	1.731.275.000	1.367.731.910	79,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,05 (BB)	70,14 (BB)	100,13%	14.497.322.167	13.092.621.030	90,31
Total Belanja						229.525.465.418	224.867.413.824	97,97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja diatas, hanya sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah saja yang mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 90,31%. Sementara itu capaian kinerja pada sasaran tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP sebesar 66,67% dengan realisasi anggaran sebesar 98,68%. Sedangkan capaian kinerja tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah sebesar 96,39% dengan realisasi anggaran sebesar 79%.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan (BKAD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja yang disusun secara periodik

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja tahun berikutnya. Harapannya, Laporan ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Air Putih, Mei 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



**RIZALI, S.Pd
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19790604 200604 1 016

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi	3
1.5. Isu Strategis	4
1.6. Keadaan Pegawai	5
1.7. Sarana Dan Prasarana	6
1.8. Keuangan.....	8
1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah	11
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	17
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	19
3.4. Realisasi Anggaran	20
3.5. Inovasi.....	29
3.6. Penghargaan	30
 BAB IV PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Rencana Tindak Lanjut	32

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2023 ..	13
Tabel 2.3	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis.....	13
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra).....	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja berdasarkan Target Perjanjian Kinerja.....	17
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Anggaran.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023	24
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023...	28
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi.....	30
Tabel 3.7	Penghargaan atas capaian kinerja BKAD yang diberikan Tahun 2023	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang– Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh–sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip–prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Kinerja.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1) Peningkatan akuntabilitas BKAD Kabupaten Batu Bara;
- 2) Umpan balik bagi peningkatan kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara;
- 3) Meningkatkan Kredibilitas BKAD Kabupaten Batu Bara terhadap pemberi amanah/ delegasi wewenang;
- 4) Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

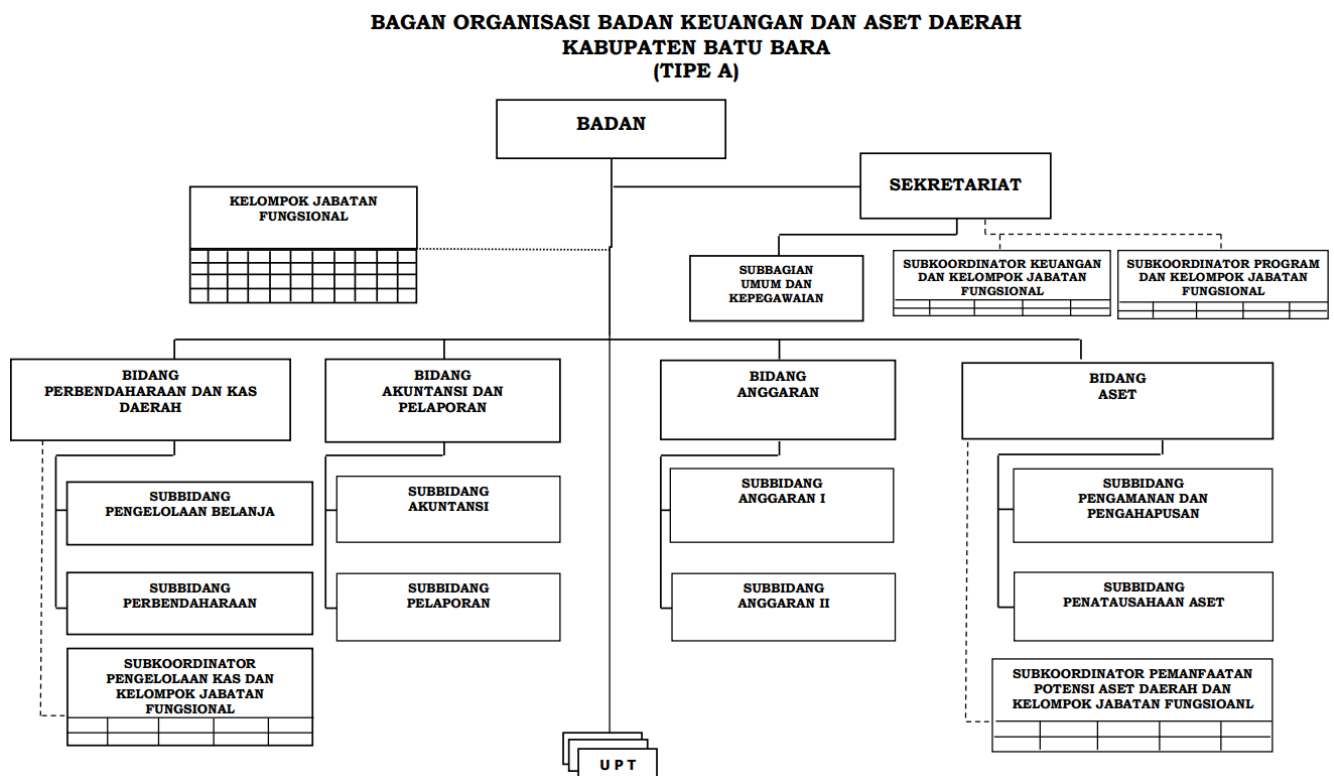
1.3. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menjabarkan melalui peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan keuangan dan Aset daerah secara umum maka BKAD Kabupaten Batu Bara perlu di tunjang dengan jabatan struktural dan fungsional yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga beban kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh Pejabat Struktural dan fungsional yang mengembannya. BKAD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala Sub Bidang serta 4 (empat) Subkoordinator dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subkoordinator Keuangan, dan
 - c. Subkoordinator Program
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran I, dan
 - b. Sub Bidang Anggaran II
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan, dan

- c. Subkoordinator Pengelolaan Kas
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi, dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan
6. Bidang Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset, dan
 - c. Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah

Adapun Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, serta Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah sela kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.

1.5. Isu Strategis

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan

Pemerintah daerah dalam mencapai *Good* dan *Clean Governance*. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Mempertahankan Opini atas Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
4. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
5. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang

1.6. Keadaan Pegawai

Aparatur Sumber Daya Manusia BKAD Kabupaten Batu Bara sampai dengan Bulan Desember 2023 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.1. dan berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Tabel 1.3. berikut ini :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1	0	1
2	Eselon III A	1	0	1
3	Eselon III B	3	1	4
4	Eselon IV A	5	4	9
5	Pelaksana	10	16	26
6	Subkoordinator / Ketua Tim	3	1	4
7	Fungsional	0	0	0
JUMLAH TOTAL		23	22	45

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	17	13	30
3	Golongan II	5	8	13
JUMLAH TOTAL		23	22	45

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Magister (S2)	3	4	7
3	Sarjana (S1)	13	11	24
4	Diploma III	6	4	10
5	SLTA	1	3	4
JUMLAH TOTAL		23	22	45

1.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Batu Bara yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	A.C. Split	1
2	A.C. Window	22
3	Acces Point	12
4	Alat Kantor Lainnya	5
5	Alat Kesehatan Umum lainnya	1
6	Alat Pemadam/Portable	2
7	Alat Penghancur Kertas	1
8	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1
9	Aset Renovasi	5
10	Brandkas	3
11	Buku Umum Lain-lain	10
12	Camera Digital	2
13	CCTV - Camera Control Television System	2

14	Dispenser	4
15	Exhaust Fan	2
16	External	2
17	External/ Portable Hardisk	3
18	Filing Cabinet Besi	7
19	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2
20	Gordiyin/Kray	10
21	Handy Talky (HT)	1
22	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1
23	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1
24	Kipas Angin	2
25	Komputer Jaringan lainnya	3
26	Kursi Besi/Metal	71
27	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
28	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	10
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9
31	Kursi Kerja Pejabat lainnya	11
32	Kursi Rapat	50
33	Kursi Tamu	3
34	Lap Top	28
35	Layar Film/Projector	3
36	LCD Projector/Infocus	1
37	Lemari Besi/Metal	4
38	Lemari Es	1
39	Lemari Kayu	6
40	Loudspeaker	1
41	Lukisan lain-lain	2
42	Meja 1/2 Biro	31
43	Meja Kerja Kayu	4
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
46	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
47	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2
48	Meja Rapat Pejabat lainnya	20
49	Mesin Absen (Time Recorder)	1
50	Mesin Penghitung Uang	2
51	Microphone	1
52	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
53	Netware Interface External	15
54	P.C Unit	52
55	Papan Nama Instansi	1
56	Papan Pengumuman	167
57	Papan Visual/Papan Nama	1
58	Partisi	12

59	Penangkal Petir	2
60	Pick Up	1
61	Portable Generating Set	1
62	Portable Reporter Link	1
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42
64	Rak Besi	3
65	Rak Kayu	1
66	Rak-Rak Penyimpan	1
67	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
68	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
69	Self Supporting Tower	1
70	Sepeda Motor	4
71	Server	2
72	Sofa	2
73	Sound System	2
74	Stabilisator	1
75	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
76	Telephone Mobile	5
77	Televisi	2
78	Unit Power Supply	1

1.8. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKAD pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Alokasi anggaran murni BKAD untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp.233.357.163.529,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.229.525.465.418,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab V – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2019 – 2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 adalah : **“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”**.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam rencana kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang terkolerasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
- b. Konsisten dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

- d. Pemetaan secara cermat potensi risiko yang akan terjadi Ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. BKAD Kabupaten Batu Bara telah Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disajikan pada Table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP
2	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	Persen	90,05
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	70,14 (BB)

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang terpilih yaitu : **“Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”** sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Batu Bara melaksanakan tugas sesuai rencanan yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun Target belanja BKAD Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	20.927.562.581	9,12 %
Belanja Modal	1.168.443.637	0,51 %
Belanja Tidak Terduga	2.167.800.000	0,94 %
Belanja Transfer	205.261.659.200	89,43 %
Jumlah	229.525.465.418	100 %

Sedangkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	213.296.868.251	92,93 %
2	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.731.275.000	0,75 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	14.497.322.167	6,32 %
JUMLAH		229.525.465.418	100 %

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara beberapa program dan kegiatan, program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel di atas, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada Tahun Anggaran 2023 menampung dan melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2023.
2. Penurunan kinerja serta alternatif analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target serta realisasi pada indikator sasaran dengan rincian sebanyak 3 sasaran dan 3 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020			2021			2022			2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WDP	66,67
2	Tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah	Pesentase Aset dalam Kondisi Baik	%	88,24%	88,24	100	88,84	88,84	100	89,29	89,29	100	90	93,05	103,39	90,00%	89,84%	97,65
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	B	B	100	B	B	100	B	B	100	B	B	100	70,05 BB	70,14 BB	100,13

Tabel 3.2
Capaian Kinerja berdasarkan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP	WDP	66,67%
2	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	Persen	93,20	89.84	96,39%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	70,05 (BB)	70,14 (BB)	100,13%

Dari tabel diatas, terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam tiga indikator. Pada Tahun 2019-2022 realisasi kinerja pada indikator Opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sehingga capaian kinerja selama 4 Tahun terakhir mencapai 100%. Pada Tahun 2023 ini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian capaian indikator Opini BPK pada Tahun 2023 ini mencapai 66,67%.

Realisasi capaian kinerja pada indikator persentase asset dalam kondisi baik dari Tahun 2019 – 2021 mencapai 100%. Pada Tahun 2022, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 103,39%. Sementara itu pada Tahun 2023, realisasi pada indikator ini sebesar 89,84% dari target Renstra sebesar 90%.

Capaian kinerja dengan indikator nilai AKIP, pada Tahun 2019 – 2022 mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2023 BKAD mendapatkan nilai 70,14 (BB) dari target nilai yang ditetapkan sebesar 70,05 (BB). Dengan demikian, capaian target dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah tercapai 100,13%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Opini BPK, Persentase asset dalam kondisi baik, dan nilai AKIP. Indikator tersebut sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai, dan diukur, serta berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah Tahun 2023 dengan memperoleh nilai B dari target nilai AKIP yang ditetapkan yaitu B.

Adapun faktor keberhasilan dari pencapaian akuntabilitas keuangan dan kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen pegawai dalam melakukan pembenahan manajemen pengelola keuangan dan asset daerah serta integritas pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Semangat bekerja pegawai BKAD yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja, inovasi dan pelayanan juga menjadi faktor keberhasilan pencapaian target nilai AKIP.

Selanjutnya, agar pencapaian ini terus meningkat, dapat dilakukan upaya berupa pemberian *reward* kepada pegawai atau bidang yang berkinerja terbaik sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik yang telah dilakukan.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Tahun Laporan 2023 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perolehan opini WDP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara tersebut dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu :

- Penetapan penganggaran pendapatan tidak rasional, penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya tidak sesuai ketentuan, dan defisit APBD melampaui ketentuan yang mengakibatkan SILPA belum sepenuhnya dapat menyajikan kemampuan keuangan daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang;
- Realisasi belanja insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah;
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan mutu pekerjaan.

Dari temuan BPK diatas yang menjadi penyebab perolehan opini WDP bukan disebabkan karena penyajian data yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian Sasaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah seharusnya tercapai 100 persen. Namun dikarenakan indikator pada sasaran tersebut ditetapkan berupa opini BPK dan opini

yang diberikan adalah WDP, maka capaian sasaran dengan indikator tersebut sebesar 66,67%

3. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dengan meningkatkan persentase asset dalam kondisi baik memperoleh capaian sebesar 96,39%. Namun, jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis, capaian tersebut mencapai 99,82%. Perbedaan capaian ini disebabkan karena perbedaan target pada dokumen rencana strategis dengan target pada dokumen perjanjian kinerja. Target pada dokumen perjanjian kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan perolehan capaian sasaran yang sama pada tahun 2022. Sedangkan target pada dokumen rencana strategis ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian pada akhir periode renstra sebelumnya. Adapun penyebab tidak tercapainya sasaran kinerja sesuai target disebabkan karena realisasi pada belanja pemeliharaan barang milik daerah tidak maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi pengeluaran belanja terkait dengan defisit keuangan daerah.

BKAD melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja rutin dilakukan setiap triwulan.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama OPD.

Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Sementara pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah.

Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara mempertimbangan objektivitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam mengukur capaian indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 didasarkan pada:

1. Angka maksimum capaian indikator sasaran ditetapkan 100% penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator sasaran adalah:
 - a. *Opini BPK = Nilai Opini BPK*
 - b. *Persentase aset dalam kondisi baik = $\frac{\text{Jumlah aset dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total aset Pemkab}} \times 100\%$*
 - c. *Nilai AKIP = Nilai Evaluasi AKIP OPD dari Inspektorat*

3.4. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja BKAD Kab Batu Bara dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 diatas, maka untuk target dan realisasi anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.497.322.167	13.092.621.030	90,31
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.975.620	103.155.000	96,43
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.337.810	61.761.000	95,99
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42637810	41.394.000	97,08
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.778.877.378	4.629.986.158	80,12
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.641.169.692	4.494.686.158	79,68
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.025.000	61.878.000	99,76
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.682.686	73.422.000	97,01
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.952.612	184.398.000	99,16
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	185.952.612	184.398.000	99,16
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.395.930.641	1.306.997.876	93,63
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.207.454	14.065.300	99,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	476.227.199	467.878.100	98,25
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.140.220	97.446.000	59,37
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.755.768	22.314.000	98,06
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	54.000.000	100,00
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	664.600.000	651.294.476	98,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.296.450.000	4.244.115.000	98,78
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.765.600.000	3.765.600.000	100,00
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	530.850.000	478.515.000	90,14
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.943.504.245	1.901.133.298	97,82
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000	7.900.000	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	412.124.245	375.174.850	91,03
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.523.480.000	1.518.058.448	99,64
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.631.671	722.835.698	91,54
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.799.999	47.345.012	70,88
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.831.672	80.285.000	65,36

1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	595.205.686	99,20
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	213.296.868.251	210.407.060.884	98,65
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.736.800.000	1.588.826.612	91,48
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	255.190.000	251.212.569	98,44
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	183.570.000	160.034.293	87,18
2.1.3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	234.290.000	170.308.991	72,69
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	241.450.000	230.733.000	95,56
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	384.350.000	369.952.724	96,25
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	437.950.000	406.585.035	92,84
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.288.800.003	1.274.059.560	98,86
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	103.800.000	103.457.000	99,67
2.2.2	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	145.000.003	143.912.000	99,25
2.2.3	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	158.400.000	157.280.000	99,29
2.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	376.600.000	371.847.900	98,74
2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	105.800.000	105.080.171	99,32
2.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	50.000.000	48.493.000	96,99
2.2.7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	68.130.000	65.919.439	96,76
2.2.8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	176.650.000	175.619.319	99,42
2.2.9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	104.420.000	102.450.731	98,11
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.144.420.000	1.016.897.970	88,86

2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	175.910.624	175.133.200	99,56
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	142.446.624	140.651.000	98,74
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	87.800.000	86.566.000	98,59
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	155.652.000	145.279.100	93,34
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	173.800.000	173.541.000	99,85
2.3.6	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	241.652.000	145.729.000	60,31
2.3.12	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	167.158.752	149.998.670	89,73
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	209.126.848.248	206.527.276.742	98,76
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.682.389.048	257.984.542	15,33
2.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	199.565.159.200	199.559.292.200	100,00
2.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.167.800.000	998.500.000	46,06
2.4.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.711.500.000	5.711.500.000	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.731.275.000	1.367.731.910	79,00
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.731.275.000	1.367.731.910	79,00
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	44.980.000	40.857.000	90,83
3.1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	481.210.000	436.097.545	90,63
3.1.3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	144.900.000	126.240.375	87,12
3.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	586.135.000	388.776.046	66,33
3.1.5	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	178.000.000	174.525.972	98,05
3.1.6	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	198.002.500	174.076.472	87,92
3.1.7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	300.000	300.000	100,00
3.1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97.747.500	26.858.500	27,48
JUMLAH TOTAL		229.525.465.418	224.867.413.824	97,97

Selanjutnya, perbandingan dengan realisasi tahun lalu ditampilkan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Tahun Anggaran	
	2022	2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.066.775.960	13.092.621.030
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.285.478	103.155.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.770.478	61.761.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.515.000	41.394.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.746.355.808	4.629.986.158
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.628.814.808	4.494.686.158
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.950.000	61.878.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60.591.000	73.422.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.983.700	184.398.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.333.700	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.650.000	184.398.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	936.729.192	1.306.997.876
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.961.000	14.065.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.198.500	467.878.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.600.000	97.446.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.079.000	22.314.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	54.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.890.692	651.294.476
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.014.870.100	4.244.115.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.355.998.800	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.800.000	3.765.600.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	408.071.300	478.515.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.456.231.184	1.901.133.298
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.980.000	7.900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.911.184	375.174.850
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.172.340.000	1.518.058.448

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.320.498	722.835.698
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.592.498	47.345.012
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.600.000	80.285.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	457.866.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.262.000	595.205.686
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	204.099.721.816	210.407.060.884
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.424.144.300	1.588.826.612
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	183.217.715	251.212.569
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	196.224.691	160.034.293
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	134.418.616	170.308.991
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	201.633.000	230.733.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	377.814.844	369.952.724
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	330.835.434	406.585.035
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	926.441.550	1.274.059.560
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	121.598.101	103.457.000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	83.820.000	143.912.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	61.460.000	157.280.000
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	195.981.896	371.847.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.874.000	105.080.171
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	49.874.000	48.493.000

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	124.910.000	65.919.439
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	124.357.353	175.619.319
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86.566.200	102.450.731
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	904.587.988	1.016.897.970
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	85.920.000	175.133.200
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	63.752.000	140.651.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	162.952.304	86.566.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	122.329.314	145.279.100
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	86.655.169	173.541.000
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	113.439.456	145.729.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	34.105.000	-
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	29.913.000	-
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	54.712.000	-
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	44.990.838	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	79.900.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25.918.907	149.998.670
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	200.844.547.978	206.527.276.742
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	283.036.208	257.984.542
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	178.119.362.300	199.559.292.200
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.830.237.870	998.500.000

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.611.911.600	5.711.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.838.721.679	1.367.731.910
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.838.721.679	1.367.731.910
Penyusunan Standar Harga	45.026.000	40.857.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	520.392.147	436.097.545
Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	126.240.375
Pengamanan Barang Milik Daerah	478.507.760	388.776.046
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	174.525.972
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	762.552.272	174.076.472
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4.645.000	300.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	27.598.500	26.858.500
JUMLAH TOTAL	220.005.219.455	224.867.413.824

Adapun realisasi beberapa subkegiatan tidak terserap maksimal antara lain:

- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- f. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- g. Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- h. Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- i. Pengamanan barang milik daerah
- j. Penyusunan laporan barang milik daerah

Persentase Realisasi dari Subkegiatan di atas berada dibawah 80%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi pengeluaran belanja terkait dengan defisit keuangan daerah.

Adapun anggaran dan realisasi belanja per sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	WTP	WDP	66,67	213.296.868.251	210.407.060.884	98,68
2	Tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	93,2%	89,84	96,39	1.731.275.000	1.367.731.910	79,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70,05 (BB)	70,14 (BB)	100,13	14.497.322.167	13.092.621.030	90,31
Total Belanja						229.525.465.418	224.867.413.824	97,97%

Realisasi anggaran pada sasaran kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai SAP dengan indikator Opini BPK yaitu sebesar 98,68%. Sementara itu pada sasaran tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dengan indikator persentase aset dalam kondisi baik realisasi anggarannya sebesar 79,00%. Terakhir, realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai AKIP sebesar 90,31%.

Analisis Akuntabilitas kinerja BKAD Kab Batu Bara tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan. Dari sebanyak 3 (tiga) sasaran kinerja BKAD Kab. Batu Bara, hanya 1 (satu) sasaran kinerja yang tercapai 100% yaitu sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan 2 (dua) sasaran lagi yakni sasaran tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP dan sasaran tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah hanya tercapai masing-masing 66,67% dan 96,39%.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran BKAD cukup tinggi sebesar 97,97%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat serapan anggaran Tahun 2023 terserap maksimal.

3.5. Inovasi

Pada Tahun 2023, BKAD Kabupaten Batu Bara mengimplementasikan inovasi SIPANDE (Sistem Penyampaian Dokumen Secara Elektronik) kepada seluruh OPD dalam menyampaikan dokumen SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D.

3.6. Penghargaan

Pada Tahun 2023 BKAD Kabupaten Batu Bara menerima sebanyak 1 (satu) penghargaan atas capaian kinerja di bidang aset. Adapun penghargaan tersebut disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Penghargaan atas capaian kinerja BKAD yang diberikan Tahun 2023

No.	Nama Penghargaan	Prestasi dalam Bidang	Lembaga/Instansi yang Memberikan	Waktu (Tgl/Bln/Thn)
1.	Terbaik Pertama Pemerintah Daerah Terinisiatif Dalam Penilaian Barang Milik Daerah	Aset	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	1 Desember 2023



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah Kabupaten agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA BKAD Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023, Laporan Tahunan 2023 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga disadari pembuatan Laporan Tahunan ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Dari sebanyak 3 (tiga) sasaran kinerja BKAD Kab. Batu Bara, hanya 1 (satu) sasaran kinerja yang tercapai 100% yaitu sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 90,31%. Sedangkan 2 (dua) sasaran lagi yakni sasaran tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP dan sasaran tercapainya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah hanya tercapai masing-masing 66,67% dan 96,39% dengan realisasi anggaran sebesar 98,68% dan 79%.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 diatas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/ kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.





**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. ZAHIR, MAP**
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

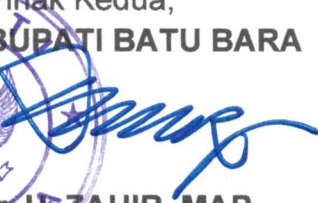
Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	Opini BPK	Opini	WTP
2	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	Persen	93,20
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (70,05)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.497.322.167	PAPBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	213.296.868.251	PAPBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.731.275.000	PAPBD
JUMLAH		229.525.465.418	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA


Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660417 199803 1 004



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Huruf	BB (70,05)
2	Tercapainya Cakupan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Persen	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.497.322.167	PAPBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	207.444.459.200	PAPBD
	JUMLAH	221.941.781.367	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



SAIRUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HELDA, S.Keb, M.Km**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

HELDA, S.Keb, M.Km
Penata Muda Tk. I
NIP. 19760313 200801 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100
	Tercapainya penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	Orang	43
2	Tercapainya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100
	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	69
	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12
	Terselenggaranya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5
	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	540
	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
3	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
	Tersedianya unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	48
	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	38
4	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
5	Tercapainya Pemenuhan Pemeliharaan Barnag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2
	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	66

NO	SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	55

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.952.612	PAPBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	185.952.612	PAPBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.395.930.641	PAPBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.207.454	PAPBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	476.227.199	PAPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.140.220	PAPBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.755.768	PAPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000	PAPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	664.600.000	PAPBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.296.450.000	PAPBD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.765.600.000	PAPBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	530.850.000	PAPBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.943.504.245	PAPBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.124.245	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.523.480.000	PAPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.631.671	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.799.999	PAPBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.831.672	PAPBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	PAPBD
JUMLAH		8.611.469.169	PAPBD

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



HELDA, S.Keb, M.Km
Penata Muda Tk. I
NIP. 19760313 200801 2 003



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MISPRANOTO, SM.**
Jabatan : **ANALIS PENDAPATAN DAERAH / KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

MISPRANOTO, SM.
Penata Muda
NIP 19880121 201001 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100
	Tersedianya dana gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	43
	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8
	Tersusunnya dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran SKPD yang disusun	Laporan	18
2	Tercapainya penyelenggaraan penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga	Persentase penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga	Persen	100
	Tersedianya dana dalam penyaluran bantuan keuangan ke desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12
	Terselenggaranya pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12
	Tersedianya dana bagi hasil yang akan diberikan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.778.877.378	PAPBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.641.169.692	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.025.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	75.682.686	PAPBD
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	207.444.459.200	PAPBD
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	199.565.159.200	PAPBD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.167.800.000	PAPBD
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.711.500.000	PAPBD
JUMLAH		213.223.336.578	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS BKAD
KABUPATEN BATU BARA


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
 Penata Tk. I
 NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
KETUA TIM SUBSTANSI KEUANGAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA


MISPRANOTO, SM.
 Penata Muda
 NIP 19880121 201001 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR. S, S.Pi**
Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN /
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**SEKRETARIS BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR. S.Pi
Penata Muda Tk. I
NIP 19911221 201403 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12
	Tersusunnya laporan terkait capaian dan realisasi kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.975.620	PAPBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	64.337.810	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	42.637.810	PAPBD
JUMLAH		106.975.620	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS BKAD
KABUPATEN BATU BARA


SAIPUDIN SEFA, S.EI, M.M.
 Penata Tk. I
 NIP. 19850823 201001 1 018

Pihak Pertama
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM
BKAD KABUPATEN BATU BARA


MUHAMMAD KHAIRI MIZWAR. S.PI
 Penata Muda Tk. I
 NIP 19911221 201403 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAINUL ARIF, SEI, MM**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, SEI, MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Persen	92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.971.189.051	PAPBD
JUMLAH		2.971.189.051	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI, MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURYANTI, S.E., MM.**
Jabatan : **KASUBBID PENGELOLAAN BELANJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAINUL ARIF, S.EI., MM.**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, S.EI., MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KASUBBID PENGELOLAAN
BELANJA
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

NURYANTI, S.E., MM.
Penata
NIP 19820227 201101 2 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN BELANJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan realisasi belanja daerah	Persen	95
	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	24
	Terselenggaranya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	456

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	281.070.000	PAPBD
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	176.650.000	PAPBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	104.420.000	PAPBD
JUMLAH		281.070.000	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN
DAN KAS DAERAH
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI., MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KASUBBID PENGELOLAAN
BELANJA
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



NURYANTI, S.E., MM.
Penata
NIP 19820227 201101 2 008



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.**
Jabatan : **KASUBBID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAINUL ARIF, SEI., MM**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, SEI., MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KASUBBID PERBENDAHARAAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.
Penata
NIP 19860530 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan realisasi belanja daerah	Persen	95
	Tersusunnya dokumen koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	6000
	Tersusunnya dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Laporan	100
	Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	24

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	550.530.000	PAPBD
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	376.600.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	105.800.000	PAPBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	68.130.000	PAPBD
JUMLAH		550.530.000	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI., MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KASUBBID PERBENDAHARAAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



SONGGY MEINER SIAHAAN, S.T.
Penata
NIP 19860530 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI AHMAD FAUJI, S.E.**
Jabatan : **ANALISIS PENDAPATAN DAERAH /
KETUA TIM SUBSTANSI PENGELOLAAN KAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAINUL ARIF, SEI., MM**
Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

ZAINUL ARIF, SEI., MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI
PENGELOLAAN KAS
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

DEDI AHMAD FAUJI, S.E.
Penata
NIP 19841110 201001 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI PENGELOLAAN KAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan realisasi belanja daerah	Persen	95
	Tersusunnya dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Dokumen	20
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Dokumen	150
	Tersusunnya dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	65
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan utang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan utang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	40
2	Tercapainya penyelenggaraan penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga	Persentase penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga	Persen	100
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Dokumen	40

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	457.200.003	PAPBD
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	103.800.000	PAPBD
	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	145.000.003	PAPBD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	158.400.000	PAPBD
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	50.000.000	PAPBD
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.682.389.048	PAPBD
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.682.389.048	PAPBD
JUMLAH		2.139.589.051	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



ZAINUL ARIF, SEI., MM
Penata Tk. I
NIP 19851230 201001 1 028

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI
PENGELOLAAN KAS
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



DEDI AHMAD FAUJI, S.E.
Penata
NIP 19841110 201001 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPPY NEW YEAR BONITA, SE, MM.**

Jabatan : **KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE, MM.
Penata Tk. I
NIP 19840101 200804 2 002

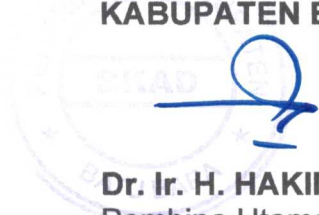
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.144.420.000	PAPBD
JUMLAH		1.144.420.000	PAPBD

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



HAPPY NEW YEAR BONITA, SE, MM.
Penata Tk. I
NIP 19840101 200804 2 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WILLY GITA ARJUNA, A.Md**
Jabatan : **KASUBBID AKUNTANSI**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAPPY NEW YEAR BONITA BONITA, SE., MM.**
Jabatan : **KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**


HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
Penata Tk. I
NIP 19840101 200804 2 002

Pihak Pertama
**KASUBBID AKUNTANSI
BKAD KABUPATEN BATU BARA**


WILLY GITA ARJUNA, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP 19870620 201001 1 014

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100
	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	43
	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	48
	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	6
	Tersusunnya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	672.521.376	PAPBD
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	175.910.624	PAPBD
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	155.652.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	173.800.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan	167.158.752	PAPBD
JUMLAH		672.521.376	

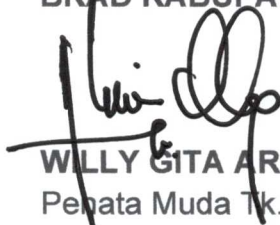
Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
Penata Tk. I
NIP 19840101 200804 2 002

Pihak Pertama
**KASUBBID AKUNTANSI
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



WILLY GITA ARJUNA, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP 19870620 201001 1 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHARMAWAN PUTRA, S.E.**

Jabatan : **KASUBBID PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.**

Jabatan : **KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua

**KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.

Penata Tk. I

NIP 19840101 200804 2 002

Pihak Pertama

**KASUBBID PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

DHARMAWAN PUTRA, S.E

Penata

NIP 19860424 201101 1 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100
	Tersusunnya dokumen rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	8
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	17
	Tersusunnya dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	12

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	471.898.624	PAPBD
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	142.446.624	PAPBD
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	87.800.000	PAPBD
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	241.652.000	PAPBD
JUMLAH		471.898.624	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA



HAPPY NEW YEAR BONITA, SE., MM.
 Penata Tk. I
 NIP 19840101 200804 2 002

Pihak Pertama
KASUBBID PELAPORAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA



DHARMAWAN PUTRA, S.E
 Penata
 NIP 19860424 201101 1 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.**

Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID ANGGARAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.
Pembina
NIP 19831215 201001 1 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.736.800.000	PAPBD
JUMLAH		1.736.800.000	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID ANGGARAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



MUKHLIS SYAHPUTRA, S.H.I., M.AP.
Pembina
NIP 19831215 201001 1 018



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWINSYAH PUTRA DAULAY, S.ST.Pi. MM.**
Jabatan : **KASUBBID ANGGARAN I**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.**
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID ANGGARAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA

MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.
Pembina
NIP 19831215 201001 1 018

Pihak Pertama
KASUBBID ANGGARAN I
BKAD KABUPATEN BATU BARA

ERWINSYAH P. DAULAY, S.STPi. MM
Penata
NIP 19880704 201403 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persen	100
	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	38
	Tersusunnya dokumen DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	38

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	475.740.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	234.290.000	PAPBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	241.450.000	PAPBD
JUMLAH		475.740.000	

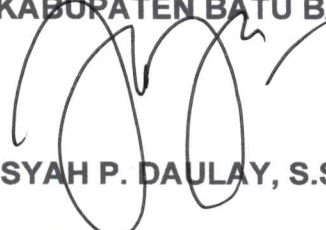
Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID ANGGARAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.
Pembina
NIP 19831215 201001 1 018

Pihak Pertama
**KASUBBID ANGGARAN I
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



ERWINSYAH P. DAULAY, S.STPi. MM
Penata
NIP 19880704 201403 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDARLIANI, S. Ak.**
Jabatan : **KASUBBID ANGGARAN II**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.**
Jabatan : **KABID ANGGARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID ANGGARAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA

MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.
Pembina
NIP 19831215 201001 1 018

Pihak Pertama
KASUBBID ANGGARAN II
BKAD KABUPATEN BATU BARA

IDARLIANI, S. Ak.
Penata
NIP 19720404 199402 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase peningkatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persen	100
	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	16
	Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	16
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6
	Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	6

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.261.060.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	255.190.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	183.570.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	384.350.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	437.950.000	PAPBD
JUMLAH		1.261.060.000	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua

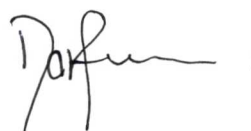
**KABID ANGGARAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



MUKHLIS SYAHPUTRA, S.HI., M.AP.
Pembina
NIP 19831215 201001 1 018

Pihak Pertama

**KASUBBID ANGGARAN II
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



IDARLIANI, S. Ak.
Penata
NIP 19720404 199402 2 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**

Jabatan : **KABID ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BKAD KABUPATEN BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**

Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama,
**KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG ASET
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Sertifikasi Tanah/Bangunan milik Pemkab	Persen	100
		Persentase Laporan Inventarisasi Aset yang disusun Tepat Waktu	Persen	100
		Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Persen	93,20

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.731.275.000	PAPBD
JUMLAH		1.731.275.000	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KEPALA BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



Dr. Ir. H. HAKIM, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660417 199803 1 004

Pihak Pertama
**KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YESSI AMELIA AGUSTINA SIREGAR, S.E, M.M.**
Jabatan : **KASUBBID PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
KASUBBID PENGAMANAN
DAN PENGHAPUSAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA

YESSI AMELIA AGUSTINA S, S.E, M.M.
Penata
NIP. 19860807 201101 2 022

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100
	Tersusunnya laporan hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil investigasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	38
	Tersusunnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	20
	Tersusunnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	929.037.500	PAPBD
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	144.900.000	PAPBD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	586.135.000	PAPBD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	198.002.500	PAPBD
JUMLAH		929.037.500	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
 Penata Tk. I
 NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
KASUBBID PENGAMANAN DAN
PENGHAPUSAN
BKAD KABUPATEN BATU BARA

YESSI AMELIA AGUSTINA S, S.E, M.M.
 Penata
 NIP. 19860807 201101 2 022



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOPIE ASRIANSYAH, SE**
Jabatan : **KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA

YOPIE ASRIANSYAH, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19840805 201406 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100
	Terusunnya dokumen penyusunan standar harga yang disusun	Jumlah dokumen penyusunan standar harga yang disusun	Dokumen	38
	Terusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	38
	Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	38
	Terusunnya dokumen laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	38

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	624.237.500	PAPBD
	Penyusunan Standar Harga	44.980.000	PAPBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	481.210.000	PAPBD
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	300.000	PAPBD
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	97.747.500	PAPBD
JUMLAH		624.237.500	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
 Penata Tk. I
 NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA

YOPIE ASRIANSYAH, SE
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19840805 201406 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUZI ANDAYU, A.Md**
Jabatan : **PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
/ KETUA TIM PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.**
Jabatan : **KABID ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI
PEMANFAATAN POTENSI ASET
DAERAH
BKAD KABUPATEN BATU BARA**

FAUZI ANDAYU, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP. 19871116 201001 1008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI PEMANFAATAN POTENSI ASET DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100
	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	38

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	178.000.000	PAPBD
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	178.000.000	PAPBD
JUMLAH		178.000.000	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
**KABID ASET
BKAD KABUPATEN BATU BARA**



NEUPAL BOSSTER MARPAUNG, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19810430 200903 1 001

Pihak Pertama
**KETUA TIM SUBSTANSI
PEMANFAATAN POTENSI ASET
DAERAH BKAD
KABUPATEN BATU BARA**



FAUZI ANDAYU, A.Md
Penata Muda Tk. I
NIP. 19871116 201001 1008